

Bangkitkan Kejayaan Maritim, Kedaulatan NKRI Harus Berpijak pada Laut

Updates. - WARTAWAN.ORG

Apr 12, 2026 - 13:09



MARITIM - Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki takdir maritim yang tak terbantahkan. Namun, pergeseran fokus pembangunan selama beberapa dekade terakhir cenderung mengarah ke daratan, mengabaikan potensi lautan yang luar biasa. Fenomena ini bukan sekadar kehilangan peluang ekonomi semata, melainkan ancaman nyata terhadap jati diri bangsa yang tertanam dalam semboyan 'Jalesveva Jayamahe'. Tanpa akar bahari yang kuat, masa depan bangsa akan kehilangan arah strategis.

Mengembalikan kejayaan maritim bukanlah sekadar nostalgia sejarah, melainkan keharusan strategis demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional harus direvitalisasi melalui kekuatan maritim, yang seharusnya menjadi *Center of Gravity (CoG)* bagi eksistensi bangsa.

Potensi sumber daya kelautan yang melimpah sering kali belum termanfaatkan secara optimal. Kelemahan dalam penguasaan ruang laut berujung pada degradasi kedaulatan di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Peluang ekonomi dari alur laut kepulauan dan logistik maritim global pun terlewatkan, belum lagi ancaman asimetris yang mengintai di perairan yang luput dari pengawasan ketat.

Untuk menghentikan pembuangan potensi yang percuma, penguatan strategi pertahanan dan pembangunan mutlak diperlukan. *Maritime Domain Awareness (MDA)*, yang mencakup peningkatan kemampuan deteksi dan identifikasi ancaman laut, menjadi krusial. Diplomasi maritim yang kuat akan memperkokoh posisi tawar Indonesia di forum internasional, sekaligus mengamankan kepentingan nasional di laut. Pembangunan kekuatan terintegrasi, yang menyelaraskan visi Poros Maritim Dunia melalui modernisasi alutsista dan penguatan pangkalan di titik strategis, juga merupakan langkah vital.

Kebangkitan jati diri sebagai bangsa maritim adalah harga mati untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa. Kita harus menyadari secara kolektif bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Tanpa penguasaan laut yang kokoh, sejarah hanya akan menjadi catatan usang, dan masa depan penuh ketidakpastian. Kedaulatan tidak diberikan, melainkan ditegakkan melalui penguasaan ruang, terutama ruang laut yang menjadi napas nusantara.

Peran strategis pemerintah daerah sangat krusial dalam akselerasi visi maritim. Pertama, sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) harus dilakukan secara ketat. Ini bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi investasi maritim sekaligus melindungi ekosistem laut sebagai aset jangka panjang, memastikan tidak ada tumpang tindih lahan di pesisir antara kepentingan industri, konservasi, dan pertahanan.

Kedua, penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas pesisir. Pemerintah daerah perlu fokus membangun 'wajah laut', tidak hanya jalan darat. Revitalisasi pelabuhan pengumpan, pembangunan gudang pendingin (*cold storage*) bagi nelayan, dan mempermudah akses logistik dari sentra produksi ke pelabuhan akan menurunkan biaya logistik daerah dan meningkatkan nilai tambah produk kelautan lokal.

Ketiga, transformasi ekonomi berbasis kelautan atau *Blue Economy* harus digalakkan. Paradigma ekonomi perlu bergeser dari eksploitasi mentah menjadi industri pengolahan. Insentif bagi industri pengolahan hasil laut akan mendorong nelayan untuk tidak hanya melaut di sekitar pantai, tetapi mampu mengarungi samudra luas, meniru kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan juga menjadi kunci untuk menghentikan pembuangan potensi ekonomi ke luar daerah/negeri dan menciptakan lapangan kerja berbasis maritim.

Keempat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maritim. Konsep-konsep adiluhung dari leluhur perlu dihidupkan kembali untuk melahirkan generasi dengan 'budaya laut' yang holistik dan bertanggung jawab. Beasiswa spesifik di bidang kelautan, penguatan SMK Perikanan/Kelautan, dan pelatihan sertifikasi bagi nelayan tradisional agar mampu melaut di perairan ZEE adalah beberapa contoh aksi nyata. Semua ini bertujuan menghapus stigma bahwa dunia maritim adalah sektor 'kacangan' melalui profesionalisme SDM.

Wawasan Nusantara bukan sekadar doktrin geografis, melainkan mandat geopolitik untuk mengubah paradigma dari *land-based* (darat) kembali ke *sea-based* (maritim). Analisis mengenai peran pemerintah daerah sangat penting, mengingat visi besar 'Poros Maritim Dunia' sering terhambat oleh birokrasi di tingkat tapak.

Untuk mempertajam implementasi, integrasi RZWP3K dengan Rencana Wilayah Pertahanan menjadi langkah strategis. Pemda perlu memetakan 'Titik Labuh Strategis' yang berfungsi sebagai ekonomi dan pangkalan aju bagi unsur keamanan laut di wilayah rawan, memastikan investasi maritim berjalan beriringan dengan pengamanan kedaulatan.

Menghidupkan 'Tol Laut' dari daerah dengan mengembangkan *Cold Chain System* yang terintegrasi dengan pelabuhan pengumpan akan mencegah jatuhnya harga di tingkat nelayan. Laut harus dipandang sebagai infrastruktur gratis yang menghubungkan, bukan pemisah yang membebani biaya.

Restorasi budaya bahari melalui kurikulum muatan lokal di daerah pesisir yang mencakup literasi maritim dan teknologi navigasi modern akan mengubah nelayan kita dari 'nelayan pinggiran' menjadi 'pemain ZEE'. Kehadiran mereka di perbatasan secara *de facto* ikut menjaga kedaulatan negara.

Pemerintah daerah harus memandang laut sebagai beranda depan, bukan halaman belakang. Keberhasilan pembangunan maritim nasional sangat bergantung pada agregasi keberhasilan pembangunan maritim di setiap kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Mengutip kembali semangat 'Di Laut Kita Jaya', keberhasilan visi ini memerlukan kepemimpinan maritim di tingkat daerah.

Jakarta, 12 April 2026

Penulis :

Kolonel Laut E. Baratiku (Pemerhati Sejarah).

Jindar Muttaqin (Pengamat Kebijakan Strategis).

R.P.S Aji Waskita (Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jaya).

Ahmad Jayani, SH (Aktifis, Pemerhati),